

Dinamika Persepsi Publik dalam Konflik Nelayan dan Penegakan Hukum Perikanan: Studi Analisis Wacana Digital

Riri Gusnita

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

2420030023@uinib.ac.id

ABSTRACT

The conflict arising between small-scale fishers and fisheries law enforcement authorities represents a persistent socio-ecological dilemma within the framework of coastal governance, particularly in policy environments that prioritize environmental conservation through the enforcement of strict fishing regulations. This study investigates the complexities of public perceptions surrounding disputes between fishers and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), focusing on how law enforcement practices, environmental sustainability discourses, and fishers' livelihood interests are articulated and contested within digital public arenas. This research adopts a field research approach, with data analyzed using NVivo 15, drawing on 211 public narratives related to fisheries law enforcement incidents. The findings indicate that public reactions are shaped not only by issues of regulatory compliance but also by perceptions of injustice, surges of social emotion, and the structural vulnerabilities faced by small-scale fishers. While concepts of environmental protection and sustainable fisheries management are acknowledged within public discourse, such themes are often subordinated to livelihood security imperatives and demands for social justice. This study argues that fisheries conflicts cannot be comprehensively understood solely through an institutional legal framework; rather, they must be examined as social phenomena intrinsically linked to collective emotions, identity, and public trust in governmental institutions. These insights enrich the discourse on socio-ecological governance by underscoring the need for participatory, communicative, and socially legitimized law enforcement practices that reconcile marine conservation objectives with the socio-economic resilience of coastal communities.

Keywords: *coastal fisheries governance, fisheries conflict, small-scale fishers, public perception, digital discourse analysis*

ABSTRAK

Konflik yang timbul antara nelayan skala kecil dan otoritas penegak hukum perikanan mewakili dilema sosio ekologis yang terus menerus dalam kerangka tata kelola pesisir, terutama dalam lingkungan kebijakan yang memprioritaskan konservasi lingkungan melalui penerapan peraturan penangkapan ikan yang ketat. Penelitian ini menyelidiki seluk beluk persepsi publik mengenai perselisihan antara nelayan dan KKP, berkonsentrasi pada cara praktik penegakan hukum, wacana keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan mata pencaharian nelayan. Diartikulasikan dan diperebutkan dalam arena publik digital. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan analisis data diolah dengan Nvivo15, dengan 211 narasi publik, mengenai insiden penegakan hukum perikanan. Temuan menunjukkan bahwa reaksi publik dibentuk tidak hanya oleh masalah kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga oleh persepsi ketidakadilan, luapan emosi sosial, dan kerentanan struktural yang dihadapi oleh nelayan skala kecil. Sementara konsep perlindungan lingkungan dan pengelolaan perikanan berkelanjutan diakui dalam wacana publik, topik-topik seperti itu sering dimasukkan dibawah imperatif keamanan mata pencaharian dan tuntutan untuk

keadilan sosial. Penelitian ini menyatakan bahwa konflik perikanan tidak dapat dipahami secara komprehensif semata-mata melalui kerangka hukum kelembagaan, ini memerlukan pemeriksaan sebagai fenomena sosial yang secara intrinsik terkait dengan emosi kolektif, identitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Wawasan ini meningkatkan wacana tentang tata kelola sosio ekologis dengan menggarisbawahi perlunya praktik penegakan hukum partisipatif, komunikatif, dan dilegitimasi sosial yang mendamaikan tujuan konservasi laut dengan ketahanan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Kata kunci: tata kelola perikanan pesisir, konflik perikanan, nelayan skala kecil, persepsi publik, analisis wacana digital

PENDAHULUAN

Wilayah pantai di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan seluas -315 km² (5,49% dari luas Kabupaten) yang mayoritas masyarakat bergantung pada nelayan tangkap. (<https://langgam.id/kecamatan-linggo-sari-baganti-kabupaten-pesisir-selatan/>). Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan produksi perikanan laut dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada nelayan melalui penyediaan alat perikanan, yang disebarluaskan melalui pembentukan kelompok perikanan yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan. Direktur Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Pesisir Selatan, Edwil Noer, mengartikulasikan bahwa hasil penangkapan Ikan di wilayah ini telah menunjukkan fluktuasi selama bertahun-tahun, rata-rata sekitar 25.000 ton per tahun, meskipun potensi berkelanjutan sumber daya perikanan laut diperkirakan mencapai 95.000 ton per tahun (<https://www.berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/edwil-:nelayan-pessel-diberikan-bimbingan-dan-bantuan-peralatan-tangkap>).

Penelitian Li and Liu, 2022, menjelaskan bahwa Di Cina, perikanan laut mengalami fase penting yang ditandai dengan kemajuan berkualitas tinggi, dengan inovasi pendorong utama. Industri perikanan menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk tingkat produksi yang tinggi, terlepas dari penurunan populasi Ikan, yang disebabkan oleh peningkatan intensitas kegiatan penangkapan Ikan ditambah dengan kemampuan reproduksi spesies, yang secara bersamaan menimbulkan risiko eksploitasi berlebihan yang signifikan. Penelitian AftabUddin et al. 2021, menjelaskan, di Bangladesh akuakultur laut sebagai komponen fundamental dari ekonomi biru, memanfaatkan lautan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Khususnya di dalam hamparan perairan chalan beel, upaya penangkapan Ikan dibentuk oleh variasi musiman, keanekaragaman spesies Ikan yang ada, dan penerapan berbagai peralatan penangkapan Ikan yang semuanya memiliki dampak langsung pada keberlanjutan sumber daya Ikan. Penelitian Ulega et al. 2023, menjelaskan bahwa di Tanzania, pembentukan kawasan lindung laut memberikan pengaruh penting pada komposisi komunitas Ikan, di mana daerah yang dilindungi cenderung menampung populasi Ikan, yang lebih matang dan stabil secara ekologis, meskipun dalam jumlah yang berkurang relatif terhadap zona yang tidak dilindungi.

Berbeda dari penelitian di atas Penelitian ini dirancang untuk menyelidiki persepsi publik tentang konflik yang muncul antara nelayan dan penegakan hukum

perikanan, terutama melalui wacana yang berubah dalam platform digital, di mana perselisihan tersebut tidak hanya ditafsirkan melalui lensa kepatuhan peraturan, tetapi juga merangkum gesekan antara imperatif konservasi lingkungan laut dan kebutuhan ekonomi nelayan, dengan fokus khusus pada operator skala kecil. Dalam kerangka ini, penelitian mengeksplorasi faktor-faktor yang membentuk persepsi publik mengenai metodologi penegakan hukum perikanan, mengidentifikasi masalah dan tema utama yang muncul dalam wacana publik, meneliti pengaruh emosi sosial, seperti kemarahan dan rasa ketidakadilan yang dirasakan, dan menganalisis bagaimana tema keberlanjutan lingkungan laut diartikulasikan dan diprioritaskan relatif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan dalam lanskap dinamis wacana publik.

Upaya penelitian ini berusaha untuk secara cermat mengevaluasi persepsi publik mengenai konflik diantara nelayan dan penegakan peraturan perikanan melalui analisis wacana digital, yang mencakup identifikasi tema dan narasi dominan yang muncul, meneliti interaksi antara metodologi penegakan hukum dan respon emosional masyarakat, serta menilai sejauh mana isu-isu perlindungan ekosistem laut menerima perhatian yang meningkat dalam wacana publik. Realisasi tujuan tersebut diantisipasi untuk menghasilkan kontribusi teoritis dengan menyatakan konflik seputar pengelolaan sumber daya perikanan tidak dapat dipahami semata-mata melalui kerangka hukum konvensional, sebaliknya mereka harus ditafsirkan sebagai fenomena sosial yang dibentuk oleh persepsi, emosi kolektif, dan konstruksi makna. Dalam hal implikasi praktis dan orientasi kebijakan, temuan penyelidikan ini diharapkan berfungsi sebagai referensi berharga bagi tenaga penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menumbuhkan kerangka kerja yang lebih komunikatif, memelihara, adil, dan partisipatif untuk pengelolaan perikanan, sehingga mengurangi eskalasi konflik, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempertahankan keseimbangan antara kesejahteraan nelayan dan konservasi sumber daya laut.

TINJAUAN LITERATUR

1. Isu Sosial-Ekonomi Nelayan

Konflik dalam sektor perikanan tidak semata-mata berlabuh dalam persaingan untuk eksploitasi sumber daya, melainkan mereka juga secara signifikan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi yang menginformasikan dinamika di antara para pemangku kepentingan, kerangka sosial populasi pesisir, serta perumusan dan pelaksanaan strategi tata kelola perikanan. Ketika kebijakan atau praktik pengelolaan perikanan dianggap membahayakan identitas dan legitimasi nelayan, ketegangan sosial biasanya meningkat (Arias and Maris 2023, Iwane et al. 2021). Kebijakan perikanan yang mengabaikan pengetahuan lokal, keadilan dan batas-batas ekologis memiliki kapasitas untuk mengintensifkan konflik. Mengatasi konflik, perikanan memerlukan kerangka kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan adil secara ekologis (Álvarez et al. 2016, Lo et al. 2023, Seto 2023, Santos 2020, Truchet Daniela María 2018). Konflik perikanan sering mengakar dalam pencarian pengakuan, legitimasi, dan perlindungan identitas

nelayan, disamping perbedaan nilai-nilai budaya antara komunitas lokal dan kepentingan individu (Arias and Maris 2023, Lam et al. 2019).

Persepsi ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan, kelangkaan dialog antara nelayan dan badan pengatur, serta persaingan antara nelayan skala kecil dan perusahaan perikanan skala besar sering memperburuk ketegangan dalam masyarakat. Semakin diperumit oleh tekanan politik, intervensi negara melalui peraturan dan subsidi, dan dampak perubahan lingkungan dan iklim pada ketersediaan sumber daya ikan (Iwane et al. 2021, Spijkers 2017, Kelman 2020, Nilsson et al. 2019, Seto 2023). Konflik muncul ketika kebijakan atau praktik manajemen eksternal berbenturan dengan tradisi lokal (Fratsea 2022, Hammerstein, Gehrig, and Schlu 2019). Kebijakan harus memperluas dukungan kepada ekonomi lokal dan memperkuat jaringan kolaboratif di antara nelayan, untuk memastikan keberlanjutan mata pencaharian, disamping pelaksanaan manajemen adaptif yang diinformasikan sains, sehingga membuat alokasi sumber daya lebih gesit dan mengurangi konflik diantara para pemangku kepentingan (Kaya Ivonne Raystika Gretha 2023, Bailey 2020).

2. Keberlanjutan Sumber Daya Laut

Keberlanjutan sumber daya laut merupakan masalah yang kompleks karena saling ketergantungan yang rumit antara faktor ekologi, ekonomi dan sosial dalam pemanfaatan dan tata kelola (González 2016). Ancaman utama terhadap keberlanjutan laut meliputi penangkapan ikan yang berlebihan, perubahan iklim, kontaminasi lingkungan, dan tata kelola kelautan yang tidak memadai, yang secara kolektif memperburuk kerusakan ekosistem laut (Nilsson et al. 2019). Fenomena penangkapan ikan yang berlebihan telah memicu pengurangan populasi ikan dan kerusakan habitat laut, sehingga memerlukan penerapan pendekatan pengelolaan yang lebih berkelanjutan, seperti pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan penegakan kuota tangkapan yang diatur (González 2016, Nilsson et al. 2019).

Perubahan iklim, yang ditandai dengan peningkatan suhu laut, pengasaman laut, dan perubahan salinitas, telah mengganggu keseimbangan ekosistem sekaligus mempengaruhi distribusi dan produktivitas organisme laut (Monteiro 2016). Polusi yang dihasilkan dari kegiatan industri dan pengenalan spesies invasif semakin membahayakan keanekaragaman hayati laut, memerlukan peraturan yang ketat dan sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut jangka panjang (González 2016, Haihui Yao, Jianping Huang 2023). Strategi pengelolaan berkelanjutan yang berkaitan dengan sumber daya laut harus dilaksanakan melalui metodologi terintegrasi dan berorientasi jangka panjang untuk memastikan kesehatan dan produktivitas ekosistem. Metodologi yang dominan adalah manajemen berbasis ekosistem, karena tidak hanya menekankan sumber daya ikan tetapi juga memperhitungkan ekosistem laut holistik bersama dengan dampak kegiatan antropogenik melalui prioritas konservasi dan regulasi pemanfaatan sumber daya (González 2016, Nilsson et al. 2019).

Penerapan sistem pemantauan berbasis data di samping teknologi real time memfasilitasi peningkatan presisi dalam penilaian dinamika populasi ikan dan

vitalitas ekosistem, sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih bijaksana (Mo Bi, Zhenke Zhang, Xinya Guo 2023). Keterlibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan juga penting, karena dapat meningkatkan kepatuhan, menumbuhkan rasa memiliki, dan meningkatkan dukungan untuk kebijakan konservasi, terutama melalui promosi ekowisata yang menghasilkan keuntungan ekonomi sambil menegakkan keberlanjutan lingkungan (Harahab, Riniwati, and Utami 2021). Ekosistem laut menunjukkan potensi yang cukup besar untuk pemulihan alam ketika didukung oleh strategi konservasi yang sesuai, sehingga memberikan populasi dan habitat laut peluang substansial untuk pemulihan jangka panjang (Duarte et al. 2020). Paradigma ekonomi biru menyajikan kerangka pembangunan yang mendamaikan kemajuan ekonomi dengan perlindungan lingkungan laut, berfungsi sebagai dasar untuk eksploitasi sumber daya laut yang berkelanjutan (Bax et al. 2022).

3. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi terhadap Perikanan

Kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sektor perikanan memainkan peran penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya laut untuk memastikan keberlanjutan sambil secara bersamaan menangani kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penerapan praktis dari kebijakan ini sering menghasilkan konsekuensi yang bervariasi tergantung pada konteks sosial dan ekologi yang berbeda dari masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 dirumuskan untuk memfasilitasi pelaksanaan kerangka strategis nasional untuk sektor kelautan dan perikanan, implementasi yang sebenarnya telah memicu kekhawatiran masyarakat mengenai potensi degradasi kelestarian lingkungan laut (Rohani, Fasyehhudin, and J 2023). Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2021, melarang ekspor benih lobster, bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup populasi lobster yang sebelumnya telah terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan dan praktik pengelolaan yang tidak memadai (Widagdo 2023). Penegakan moratorium kegiatan perizinan dan transshipping telah mengakibatkan pengurangan operasi penangkapan dan pengolahan tuna, yang pada gilirannya berdampak buruk pada prospek lapangan kerja dan volume ekspor dalam sektor perikanan nasional (Sukarsih, Zulfainarni, and Jahroh 2019).

Kebijakan perikanan di berbagai negara menunjukkan upaya yang bertujuan untuk mendamaikan peningkatan produksi, prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, dan pertimbangan sosial ekonomi, meskipun pelaksanaan kebijakan terus menghadapi banyak hambatan. Di Bangladesh, kebijakan perikanan nasional 1998 dirumuskan dengan tujuan meningkatkan produksi perikanan sambil menjaga keseimbangan ekologis, tetap dilanda masalah eksploitasi berlebihan dan penegakan hukum yang tidak memadai, sehingga memerlukan revisi kebijakan untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor perikanan berkelanjutan (Shamsuzzaman et al. 2022). Di Inggris pasca-Brexit, kebijakan perikanan diantisipasi untuk memberikan otonomi peraturan dan peningkatan kuota tangkapan, aktualisasi harapan ini kurang optimal, karena

akses untuk kapal UE ke perairan Inggris tetap ada, dan peningkatan kuota relatif sederhana, yang berpuncak pada ketidakpuasan di antara pemangku kepentingan dalam industri perikanan (Stewart et al. 2022).

Bersamaan itu di Brasil, evolusi kebijakan publik dan reformasi kelembagaan selama beberapa dekade telah menunjukkan dampak besar pada perkembangan industri perikanan, dengan keterlibatan negara menjadi penting dalam pengelolaan sumber daya dan benteng dalam sektor ini (Matos 2022). Di Amerika Serikat, interkoneksi antara kebijakan perikanan dan kebijakan kesehatan sangat signifikan karena keduanya mempengaruhi ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan sumber daya pangan laut. Harmonisasi kedua domain kebijakan ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan mempromosikan praktik penangkapan ikan berkelanjutan (Love et al. 2017).

4. Alat Tangkap Ikan yang di Larang di Indonesia

Indonesia telah menerapkan berbagai langkah legislatif untuk membatasi pemanfaatan peralatan penangkapan ikan tertentu sebagai sarana untuk melindungi ekosistem laut dan mempromosikan metodologi penangkapan ikan yang berkelanjutan, terutama melalui pembatasan pukot dan jaringan sen, yang telah didokumentasikan dapat menimbulkan kerusakan signifikan pada populasi ikan dan lingkungan laut (Saeful Kholika 2020, Kurniawan, Riyanto, and Santoso 2017). Sesuai dengan kerangka hukum nasional yang ditetapkan, pemerintah memberlakukan hukuman pidana atas pembuatan, distribusi, dan penggunaan alat tangkapan ikan ilegal, disertai dengan pengenaan sanksi yang dapat mencakup denda hingga Rp.250.000.000,00, sebagaimana diatur dalam pasal 85A undang-undang nomor 45 tahun 2009, sehingga berfungsi sebagai tindakan perlindungan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut (Farida and Katimin 2023). Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2/Candy KP/2015, secara eksplisit melarang penggunaan pukot dan jaring tangat karena dampaknya yang merugikan terhadap ekosistem laut, sehingga peraturan ini berupaya menghasut efek jera dan mengharuskan penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk memfasilitasi kepatuhan efektif nelayan terhadap peraturan yang ditetapkan (Saeful Kholika 2020, Kurniawan, Riyanto, and Santoso 2017).

Larangan pemanfaatan perangkap dan jaring snet di Indonesia telah terbukti memberikan pengaruh yang menguntungkan pada ekosistem laut, seperti yang diilustrasikan oleh kebangkitan awal populasi ikan dan peningkatan hasil tangkapan per unit usaha untuk spesies ikan tertentu setelah pelaksanaan kebijakan (Harlisa, Mustaruddin 2018). Penegakan kebijakan terus menjadi sasaran pemeriksaan kritis, karena segmen komunitas nelayan tetap menggunakan peralatan ilegal, yang menandakan kekurangan dalam penegakan hukum serta peran penting partisipasi masyarakat dalam memantau dan meningkatkan kepatuhan (A A Marimba, R Ambo-Rappe, Y A La Nafie 2019). Prevalensi kegiatan penangkapan ikan ilegal yang berkelanjutan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara, dengan perkiraan kerugian sekitar Rp. 30 triliun pertahun, sehingga menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan kolaborasi internasional yang efektif (Harliza, Michael, and

Belakang 2020). Selain konsekuensi ekologis, larangan ini membawa konsekuensi bagi dimensi sosial ekonomi, karena mempengaruhi mata pencaharian nelayan lokal, mengharuskan perumusan kebijakan yang mendukung dan strategi mata pencaharian alternatif untuk memastikan kesejahteraan berkelanjutan masyarakat pesisir selaras dengan inisiatif konservasi sumber daya laut (Joshua, Gede, and Wisana 2023).

METODE PENELITIAN

Investigasi ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka analisis wacana digital untuk meneliti persepsimasyarakat mengenai konflik di antara nelayan dan penegakan peraturan perikanan. Pilihan metode ini didasarkan pada kapasitasnya untuk menjelaskan konstruksi makna, narasi yang berlaku, dan respon afektif komunitas yang diartikulasikan dalam lingkungan diskursif digital. Fokus penelitian terdiri dari 211 komentar publik yang dikumpulkan dari outlet media digital yang mendokumentasikan contoh konflik di antara nelayan dan penegakan hukum perikanan. Komentar sengaja dipilih berdasarkan relevansi konten mereka, khususnya yang mencakup pendapat, evaluasi, dan ekspresi yang mencerminkan sikap publik terhadap konflik yang sedang berlangsung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Nvivo15. Keseluruhan komentar diimpor keperangkat lunak sebagai unit analisis, kemudian menjalani proses analisis multi tahap. Awalnya, pengkodean terbuka dilakukan untuk menentukan istilah kunci dan pernyataan signifikan yang merangkul keprihatinan publik, emosi, dan persepsi. Setelah ini, hasil pengkodean awal diatur melalui pengkodean aksial, menghasilkan munculnya tema menonjol yang merangkul pola wacana dominan.

Untuk meningkatkan ketahanan analisis, penelitian ini memasukkan fungsionalitas cloud kata untuk memisualisasikan frekuensi dan penekanan utama istilah yang ada dalam wacana publik, di samping kueri pengkodean matrix untuk memeriksa keterkaitan antara masalah penegakan hukum dan respon emosional penduduk. Tahap penutup analisis terkonsentrasi pada interpretasi wacana untuk memahami bagaimana konflik di antara nelayan dianggap tidak semata-mata sebagai masalah hukum tetapi juga sebagai masalah yang berkaitan dengan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya laut. Integrasi data ditegaskan melalui praktik pengkodean yang konsisten dan penerapan beragam teknis analisis dalam Nvivo15, sehingga memastikan bahwa temuan penelitian memiliki validitas interpretatif dan dapat dibuktikan dalam konteks akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN



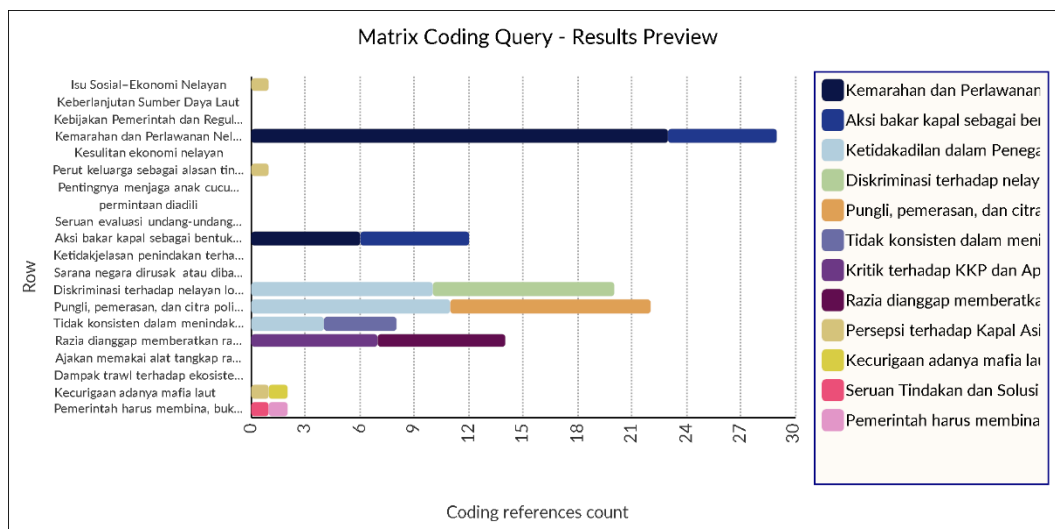
Sumber: diolah dengan Nvivo15

Representasi word cloud ini merangkum insiden yang melibatkan nelayan dan konflik yang berkaitan dengan peralatan maritim. Dimensi setiap kata menandakan frekuensi kemunculannya. Peningkatan ukuran kata berkorelasi dengan peningkatan penggunaan masyarakat. Istilah “nelayan” telah muncul sebagai istilah yang paling menonjol. Pengamatan ini menyiratkan bahwa titik fokus wacana publik dalam musyawarah ini adalah nasib dan status nelayan, terutama mereka yang terlibat dalam praktik skala kecil dan tradisional. Dominasi istilah ini membuktikan bahwa wacana yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan masalah pelanggaran hukum tetapi juga mencakup mata pencaharian dan kondisi eksistensial nelayan.

Istilah “laut”, “orang”, dan “kita” juga menonjol dalam wacana ini. Fenomena ini mencerminkan adanya sentimen kolektif yang memandang laut sebagai sumber daya komunal dan sumber makanan penting bagi penduduk, bukan hanya domain yang diatur secara ketat oleh peraturan negara. Penggabungan istilah “kita” menandakan investasi emosional yang mendalam dan rasa solidaritas komunal terhadap penderitaan nelayan. Istilah-istilah seperti “tangkap”, “aturan”, “alat”, dan “pukat” muncul, menunjukkan bahwa dialog publik secara bersamaan berorientasi pada isu-penegakan hukum dan pemanfaatan peralatan penangkapan ikan terlarang. Kehadiran istilah seperti “destruktif”, “ekosistem” dan “sumber daya” menunjukkan segmen kesadaran publik mengenai keharusan mempertahankan lingkungan laut.

Pertemuan istilah-istilah ini menjelaskan keberadaan dua persektif dominan dalam komentar publik, khususnya antara advokasi untuk penegakan peraturan yang bertujuan melestarikan ekosistem laut dan pertahankan nelayan yang dianggap sebagai individu terpinggirkan yang berjuang untuk mata pencaharian mereka. Dari analisis word cloud, dapat menyimpulkan bahwa persepsi publik tentang kegiatan nelayan di lingkungan laut beragam. Wacana ini melampaui pertimbangan hukum

belaka untuk mencakup kerangka sosial, kesejahteraan penduduk, dan keberlanjutan sumber daya laut. Keunggulan istilah “nelayan”, dan “orang” menandakan bahwa konflik yang timbul ditafsirkan oleh masyarakat sebagai masalah struktural yang berkaitan dengan hak atas kehidupan nelayan dan tata kelola laut sebagai jalur kehidupan bersama. Bersamaan dengan itu, muncul istilah yang berkaitan dengan peraturan dan degradasi lingkungan menunjukkan kesadaran bahwa, sementara penegakan hukum dianggap perlu, hal itu diantisipasi untuk dilaksanakan secara adil dan bijaksana, tanpa membahayakan nelayan skala kecil.



Sumber: diolah dengan Nvivo15

Temuan dari matrix coding query yang digunakan untuk memeriksa interaksi antara masalah dominan dan respon atau persepsi komunitas seperti yang diartikulasikan dalam komentar publik. Sumbu horizontal menggambarkan frekuensi referensi pengkodean, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan kategori masalah dan subtema yang muncul dari prosedur pengkodean data. Batang yang diperluas menandakan bahwa masalah tertentu lebih sering dibahas dan menunjukkan korelasi yang kuat dengan respon publik tertentu. Dari representasi grafis ini, terbukti bahwa kategori “kemarahan dan perlawanan nelayan” menempati posisi yang paling menonjol. Ini menunjukkan bahwa manifestasi emosi, terutama kemarahan dan perlawanan, telah menjadi reaksi sosial utama terhadap terjadinya pelarian maritim.

Subtema “aksi pembakaran kapal sebagai bentuk protes” juga menunjukkan sejumlah besar rujukan. Temuan ini menyiratkan bahwa komunitas tertentu menganggap tindakan ini tidak hanya sebagai tindak pidana, tetapi lebih sebagai simbol ketidakpuasan dan oposisi yang pedih terhadap pihak berwenang. Kategori “ketidakadilan dalam penegakan hukum”, “diskriminasi terhadap nelayan lokal”, dan “penggerebakan yang dianggap memberatkan rakyat”, menunjukkan prevalensi yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan persepsi yang jelas bahwa tindakan penegakan hukum dianggap tidak adil, tidak konsisten, dan memberatkan secara tidak proporsional bagi nelayan skala kecil dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Kekhawatiran mengenai hukuman, pemerasan, dan citra publik pejabat penegakan hukum juga muncul secara mencolok, menyoroti berkurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas ini. Bersamaan dengan itu, subtema mengenai dampak ekologis dari pukat, rekomendasi untuk adopsi alat tangkapan ikan yang berkelanjutan secara lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya laut muncul dengan frekuensi yang lebih rendah, namun masih menunjukkan tingkat kesadaran publik mengenai pertimbangan lingkungan. Di segmen bawah grafik, kategori “seruan untuk tindakan dan solusi” serta “pemerintah harus mendorong, bukan menghukum” dapat diamati. Meskipun volume referensi tidak sepenting yang berkaitan dengan konflik, kemunculan kategori ini menandakan antisipasi publik untuk pendekatan yang lebih persuasif dan berorientasi solusi dari entitas pemerintah.

Dari temuan yang diperoleh diilustrasikan dalam gambar, dapat disimpulkan bahwa persepsi publik tentang praktik nelayan sebagian besar dicirikan oleh emosi kemarahan, rasa ketidakadilan, dan perlawanan sosial. Konflik yang dihadapi tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran undang-undang hukum tetapi ditafsirkan sebagai agregasi ketidakpuasan dengan pola penegakan hukum, praktik diskriminatif, dan tekanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh nelayan. Korelasi yang jelas antara isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum dan emosi kemarahan dan perlawanan menunjukkan bahwa tindakan represif cenderung memperburuk konflik. Meskipun hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan masih diakui, mereka belum muncul sebagai fokus utama dalam kesadaran publik. Hasil analisis ini memperkuat gagasan bahwa pengelolaan perikanan dan sumber daya laut memerlukan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan mendukung untuk mencegah eskalasi konflik sosial yang lebih luas dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah.

1. Pola Wacana Dominan dalam Persepsi Publik

Hasil yang diperoleh dari analisis wacana digital yang mencakup 211 komentar publik mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat mengenai konflik di antara nelayan dan penegakan peraturan perikanan dipengaruhi oleh interaksi rumit antara motivasi ekonomi, kesetaraan sosial, dan keadilan ekologis. Visualisasi awan kata yang dihasilkan menggunakan Nvivo15 menggambarkan dominasi istilah “nelayan” sebagai itemleksikal yang paling berulang. Hasil ini menunjukkan bahwa penekanan utama wacana publik melampaui pertimbangan hukum belaka, alih-alih berkonsentrasi ada kondisi kehidupan dan rezeki ekonomi nelayan, dengan fokus khusus pada mereka yang terlibat dalam praktik penangkapan Ikan skala kecil.

Munculnya istilah tambahan seperti “laut, orang, dan, kita” menandakan pemahaman kolektif yang memandang ruang laut sebagai sumber daya bersama dan fondasi untuk mata pencaharian komunal. Penggunaan kata ganti kolektif menunjukkan keterlibatan emosional dan rasa solidaritas publik yang diarahkan kepada nelayan, yang dianggap sebagai demografis yang terpinggirkan dalam kerangka kebijakan perikanan dan penegakan hukum. Dalam kerangka ini, konflik

dikonseptualisasikan tidak hanya sebagai pelanggaran individu, tetapi sebagai perhatian sistematis yang berkaitan dengan hak untuk keberadaan dan alokasi sumber daya yang adil. Pada saat yang sama, munculnya terminologi seperti regulasi, penangkapan, instrumen, dan jaring menunjukkan bahwa penduduk tidak sepenuhnya menolak tata kelola perikanan. Sebaliknya, wacana yang berkembang menunjukkan pengakuan akan pentingnya kerangka peraturan, meskipun disertai dengan ketentuan bahwa langkah-langkah penegakan dilaksanakan secara adil dan tidak merugikan nelayan. Prevalensi istilah-istilah seperti ekosistem, merugikan, dan sumber daya menandakan bahwa kesadaran akan paradigma keberlanjutan lingkungan telah meresap ke dalam wacana publik, meskipun belum mendominasi narasi.

2. Emosi Sosial dan Persepsi Ketidakadilan Penegakan Hukum

Temuan yang berasal dari penyelidikan pengkodean matrix mengungkapkan bahwa emosi kemarahan dan pembangkangan adalah reaksi yang paling menonjol dalam komentar publik. Motif “kemarahan dan pembangkangan diantara nelayan”, munculnya dengan intensitas tertinggi, menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum penangkapan Ikan dianggap sebagai tindakan menindas yang mengintensifkan perselisihan sosial. Ekspresi emosional ini tidak terisolasi tetapi sangat berkorelasi dengan subtema ketidakadilan, diskriminasi terhadap nelayan lokal, serta operasi yang dianggap memberatkan terhadap komunitas yang terpinggirkan.

Subtema mengenai tindakan membakar kapal sebagai cara protes muncul sebagai simbol pembangkangan kolektif. Dalam wacana publik, tindakan-tindakan ini tidak selalui dibingkai sebagai kejahatan yang tegas, melainkan sebagai manifestasi frustrasi yang diarahkan pada aparat penegakan hukum yang dianggap tidak responsif terhadap realitas sosial ekonomi nelayan. Interpretasi ini mengindikasikan bahwa publik cenderung menafsirkan konflik melalui lensa kesenjangan kekuasaan antara entitas pemerintah dan masyarakat Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, kekhawatiran terkait dengan tindakan hukuman, pemerasan, dan persepsi buruk dari petugas penegak hukum menggarisbawahi krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Keyakinan bahwa hukum diterapkan secara kolektif dan tidak menentu memperkuat narasi ketidakadilan, yang pada gilirannya, memperburuk perlawanan sosial. Pengamatan ini mendukung gagasan bahwa legitimasi penegakan hukum sebagian besar bergantung pada persepsi publik tentang kesetaraan dan transparansi.

3. Memosisikan Masalah Lingkungan dalam Wacana Publik

Topik keberlanjutan lingkungan dan dampak ekologis dari praktik penangkapan Ikan yang merusak hadir dalam wacana publik, prevalensinya relatif berkurang dan relatif terhadap tema konflik dan ketidakadilan. Masyarakat menunjukkan kesadaran bahwa metode penangkapan Ikan tertentu dapat memengaruhi ekosistem laut, ditambah dengan dukungan untuk adopsi peralatan penangkapan Ikan yang lebih sehat secara ekologis. Masalah ini sering diturunkan ke status sekunder ketika disandingkan dengan imperatif ekonomi dan kebutuhan

mata pencaharian nelayan. Keadaan ini menyiratkan adanya ketegangan diskursif antara konservasi lingkungan dan kesejahteraan nelayan. Masyarakat tidak secara tegas menolak agenda konserasi, melainkan menuntut agar kebijakan lingkungan diberlakukan tanpa paksaan dan mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi oleh nelayan skala kecil. Akibatnya, keberlanjutan lingkungan dikonseptualisasikan sebagai aspirasi kolektif yang harus dikejar melalui metode persuasif dan partisipatif, bukan secara eksklusif melalui hukuman hukum.

4. Implikasi Sosial dan Kebijakan

Temuan menunjukkan bahwa diantara nelayan dan penegakan hukum perikanan dianggap oleh publik sebagai fenomena sosial yang dijiwai dengan emosi, ketidaksetaraan, dan negosiasi makna. Penegakan hukum yang didasarkan pada tindakan represif cenderung memperburuk perasaan marah dan perlawanan, sementara pendekatan komunikatif dan adil dianggap lebih mahir dalam mengurangi konflik. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan perikanan tidak dapat dibebaskan dari dimensi sosial dan emosional masyarakat Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan legitimasi sosial, yang hanya dapat dikembangkan melalui transparansi, keadilan, dan keterlibatan aktif nelayan sebagai peerta dalam pembuatan kebijakan. Keseimbangan antara konservasi sumber daya laut dan menjaga kesejahteraan nelayan sangat penting dalam perumusan kebijakan perikanan yang berkelanjutan dan adil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan bahwa perselisihan antara nelayan skala kecil dan aparat penegak hukum perikanan merupakan fenomena sosio ekologis yang berasal dari ketidakseimbangan antara tujuan konservasi laut dan kebutuhan adaptif masyarakat pesisir. Menggunakan analisis wacana digital, penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang cara dimana persepsi publik, sentimen kolektif, dan identitas sosial mempengaruhi reaksi terhadap praktik penegakan hukum dalam kerangka sosio ekologis pesisir. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara pengamanan ekosistem laut diakui sebagai kepentingan bersama, tekanan yang terkait dengan keberlanjutan mata pencaharian sering muncul sebagai faktor dominan dalam karakterisasi perselisihan perikanan. Pengelolaan berkelanjutan sumber daya pesisir dan perikanan tidak dapat didasarkan semata-mata pada kerangka peraturan, melainkan diperlukan metodologi adaptif yang secara bersamaan mencakup dimensi sosial, ekologi, dan kelembagaan. Praktik penegakan yang selaras dengan konteks lokal dan melibatkan pemangku kepentingan masyarakat memiliki kapasitas untuk meningkatkan ketahanan sosio ekologis sambil memperkuat tujuan konservasi jangka panjang. Disarankan agar penelitian yang akan datang menyelidiki seluk beluk konflik perikanan dalam kerangka sistem sosio ekologis yang lebih luas, menggabungkan pengaruh transformasi lingkungan, media digital, dan kemampuan adaptif komunitas pesisir dalam perumusan tata kelola laut yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A A Marimba., R Ambo-Rappe., Y A La Nafie., R K F Unsworth. (2019). “ Samba ' Fish Catching Operations in the Seagrass Meadows of Selayar Island , Indonesia.”
- AftabUddin, Sheikh., M. Gulam Hussain., Mamun Abdullah Al., Pierre Failler., and Benjamin M. Drakeford. (2021). “On the Potential and Constraints of Mariculture Development in Bangladesh.” *Aquaculture International* 29(2), 575–93. <https://doi.org/10.1007/s10499-020-00643-9>.
- Álvarez, Catalina B., Claudio Gajardo C., & And Francisco Ther R. (2016). “Actores y Conflictos Territoriales En Una Figura de Administración Pública de La Pesca Artesanal. El Caso de La Zona Contigua En Las Regiones de Los Lagos y de Aysén, Sur de Chile 1” 44(1), 131–47.
- Arias, Schreiber Milena., and Gillette Marias B Maris. (2023). “Reconceptualizing Coastal Fisheries Conflicts : A Swedish Case Study.” *Maritime Studies*, 22(3), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s40152-023-00317-1>.
- Bailey, Jennifer Leigh. (2020). “Assessing Knowledge Gaps and Management Needs to Cope With Barriers for Environmental, Economic, and Social Sustainability of Marine Recreational Fisheries : The Case of Spain,” 7(January), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00023>.
- Bax, Narissa., Camilla Novaglio., Kimberley H Maxwell., Koen Meyers., Joy Mccann., Sarah Jennings., Stewart Frusher., et al. (2022). “Ocean Resource Use: Building the Coastal Blue Economy.” 0, 189–207.
- Duarte, Carlos M., Carlos M Duarte., Susana Agustí., and Edward B Barbier. (2020). “Rebuilding Marine Life — Source Link This Is a Repository Copy of Rebuilding Marine Life . White Rose Research Online URL for This Paper : Version : Accepted Version Article : Roberts , Callum Michael Orcid . Org / 0000-0003-2276-4258 (2020) Rebuilding Marine Life .” <https://doi.org/10.1038/S41586-020-2146-7>.
- Farida, Ida., and R Herman Katimin. (2023). “Criminalization Policy On The Act Of Making, Producing, And Trading Illegal Fishing Capture Equipment Indonesia Is an Archipelagic State According to United Nation Convention on the Law of the Sea in 1982 (‘UNCLOS 1982’). 1 The Concept of Indonesia as an Archipelagic Is Also Explicitly State Stated in Constitution of Republic Indonesia, Particularly on Article 25a of 1945 Constitution. The Legal Basis for the Concept of an Archipelagic State in Article 25A of the 1945 Constitution Is a Conception That Has Been Agreed upon by the International Community in the UNCLOS 1982, Which Concerns the Boundaries of Territory and Patterns of International Interaction Related to Maritime”. 1 (2).
- Fratsea, Loukia-maria. (2022). “Fisheries Co-Management in the ‘ Age of the Commons’: Social Capital , Conflict , and Social Challenges in the Aegean Sea.”
- González, José-antonio. (2016). “Sustainability of Marine Food Resources – An Ecological and Fishery Approach”. 2 (3), 1–5. <https://doi.org/10.15436/2378-6841.16.1027>.
- Haihui Yao., Jianping Huang., Junhua li. (2023). “Retracted: A PCA-DEA-Based Model for Assessing the Sustainability of Marine Economy” 2022.

- Hammerstein, Peter., Stefan Gehrig., and Achim Schlu. (2019). "Sociocultural Heterogeneity in a Common Pool Resource Dilemma," 1-16.
- Harahab, Nuddin., Harsuko Riniwati., and Tiwi Nurjannati Utami. (2021). "Sustainability Analysis of Marine Ecotourism Management for Preserving Natural Resources and Coastal Ecosystem Functions," no. Cmc, 71-86. <https://doi.org/10.5755/10.5755/j01.erem.77.2.28670>.
- Harlisa, Mustaruddin., Tri Wiji Nurani. (2018). "Hubungan Kondisi Sumberdaya Ikan Dengan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Tarik di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan." 10 (1), 59-68.
- Harliza, Elvinda Rima., Tomy Michael. (2020). "Penegakan Hukum Illegal Fishing". 13, 120-30.
- Iwane, Mia A., Kirsten M Leong., Mehana Vaughan., and Kirsten L L Oleson. (2021). "When a Shark Is More Than a Shark: A Sociopolitical Problem-Solving Approach to Fisher-Shark Interactions". 2(May). <https://doi.org/10.3389/fcosc.2021.669105>.
- Joshua, Karl., I Dewa Gede., and Karma Wisana. (2023). "Dampak Moratorium Kapal Penangkap Ikan Asing." 11(1), 105-21.
- Kaya Ivonne Raystika Gretha., Sajriawati. (2023). "Seme (Social And Ecological Market Economy) Terhadap Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan Dan Kesejahteraan Nelayan." 7, 32-39.
- Kelman, Jonathan H C. (2020). "Why Climate Change and State Subsidies Will Collide to Create Fishery Conflict." 13(4), 96-108.
- Kurniawan, Wawan., Agus Riyanto., and Edi Santoso. (2017). "Uji Operasional Alat Tangkap Ramah Lingkungan Jaring Ciker (Jaring Tiga Lapis Atau Trammel Net)." 15, 47-55.
- Lam, Mimi E., Tony J Pitcher., Szymon Surma., Jeffrey Scott., Matthias Kaiser., April S J White., Evgeny A Pakhomov., and Lawrence M Ward. (2019). "Value- and Ecosystem-Based Management Approach: The Pacific Herring Fishery Conflict." 617, 341-64.
- Li, Bo., and Zun Liu. (2022). "Measurement and Evolution of High-Quality Development Level of Marine Fishery in China." *Chinese Geographical Science*, 32(2), 251-67. <https://doi.org/10.1007/s11769-022-1263-7>.
- Lo, Chungwan., Selin Deniz., Jakob Hardt., Rosario Pérez López., and Jule Pleyer. (2023). "Sustainable Reform of European Union (EU): Common Fisheries Policy," April, 95-112.
- Love, David Clifford., Patricia Pinto., Julia Olson., Jillian Parry Fry., and Patricia Mary Clay. (2017). "Fisheries, Food, and Health in the USA: The Importance of Aligning Fisheries and Health Policies," 1-15. <https://doi.org/10.1186/s40066-017-0093-9>.
- Matos, Clenilda. (2022). "Mudanças Institucionais e a Gestão Das Políticas Públicas Pesqueiras No Brasil." 22. <https://doi.org/10.53660/CONJ-1217-U04>.
- Mo Bi., Zhenke Zhang., Xinya Guo., Lei Wan. (2023). "Evaluation of Sustainable Utilization of African Marine."
- Monteiro, Pedro Valadas. (2016). "Fisheries And Climate Change: Inevitability Or

Prophylaxis? Contributing To A Necessary Debate.”

- Nilsson, Jessica A., Elizabeth A Fulton., Craig R Johnson., and Marcus Haward. (2019). “How to Sustain Fisheries: Expert Knowledge from 34 Nations,” 1–42. <https://doi.org/10.3390/w11020213>.
- Rohani, Aceng Asnawi., M Fasyehhudin., and Belardo Prasetya M J. (2023). “Supremasi Hukum’ Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 Aceng Asnawi Rohani, M. Fasyehhudin, & Belardo Prasetya M.J.” 19 (27): 27–36.
- Saeful Kholika., Rahmanisa Faujura. (2020). “Penegakan Hukum Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Pelarangan Penggunaan Pukat Hela Cantrang Di Kabupaten Indramayu.”
- Santos, Lucas Lima dos. (2020). “O’ Criador’ e Os’ Barcos Grandes’: Imaginando Políticas Institucionais Pesqueiras e Ambientais The’ Criador’ and the’ Barcos Grandes’: Imagining Institutional Fishing and Environmental Policies.” 896:1–20. <https://doi.org/10.1590/2178-2547-BGOELDI-2019-0008>.
- Seto, Katherine L. (2023). “Evidence of Spatial Competition , over Resource Scarcity , as a Primary Driver of Conflicts between Small-Scale and Industrial Fishers.” 28(1).
- Shamsuzzaman, Mostafa., Mohammad Mahmudul Islam., Amany Begum., and Petra Schneider. (2022). “Assessing Fisheries Policies of Bangladesh : Need for Consistency or Transformation ?” 1–16.
- Spijkers, Jessica. (2017). “Environmental Change and Social Conflict: The Northeast Atlantic Mackerel Dispute.” 1835–51. <https://doi.org/10.1007/s10113-017-1150-4>.
- Stewart, Bryce D., Chris Williams., Richard Barnes., Suzannah F Walmsley., and Griffin Carpenter. (2022). “The Brexit Deal and UK Fisheries — Has Reality Matched the Rhetoric ?” *Maritime Studies*, 1–17. <https://doi.org/10.1007/s40152-022-00259-0>.
- Sukarsih, Yayuk., Nimmi Zulbainarni., and Siti Jahroh. (2019). “The Impact Of The Moratorium And Transshipment Policies On The Tuna Fisheries Business In Bitung Indonesia.” 8(04), 329–32.
- Truchet Daniela María. (2018). “De Espaldas Al Mar: Conflictividad Socioecológica,” 9–26.
- Ulega, Abdallah., Yunus Mgaya., Razack Lokina., and Reguli Mushy. (2023). “The Contribution of Marine Fisheries to Socio-Economic Development in Tanzania Mainland: Reflections on the Blue Economy Concept from Selected Coastal Villages.” *Journal of the Geographical Association of Tanzania*, 42(2), 1–22. <https://doi.org/10.56279/jgat.v42i2.229>.
- Widagdo, Yudi. (2023). “Indonesian Government Policy In Maintaining Environmental Conservation Of Marine Biota Through The Export Prohibition Of Lobster Shrimp Seed.” XI(7), 314–22.